



Aksi Legislatif dan Kerangka Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Air

Mohamad Mova AlAfghani, PhD

mova@alafghani.info

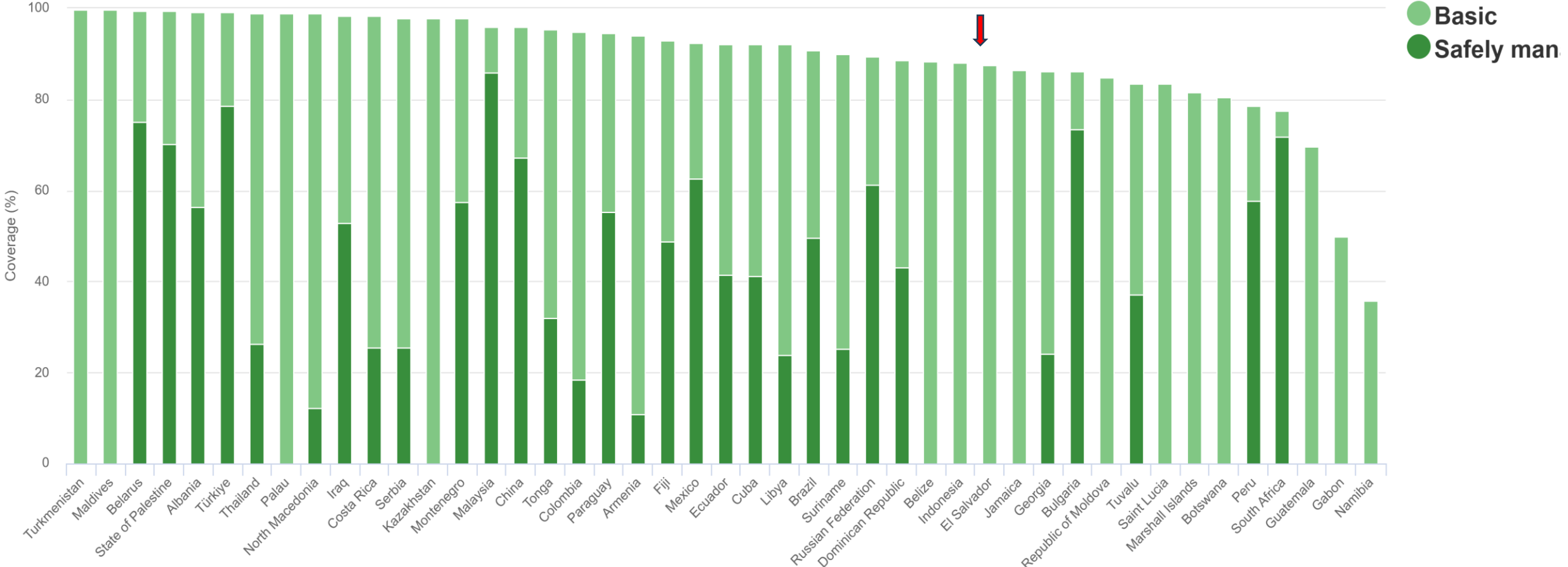
Pariamentarians for Climate Action and Ending Water Insecurity

BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Westminster Foundation for
Democracy dan Uni Eropa

Hotel Alana Sentul City | Rabu, 15 Mei 2024

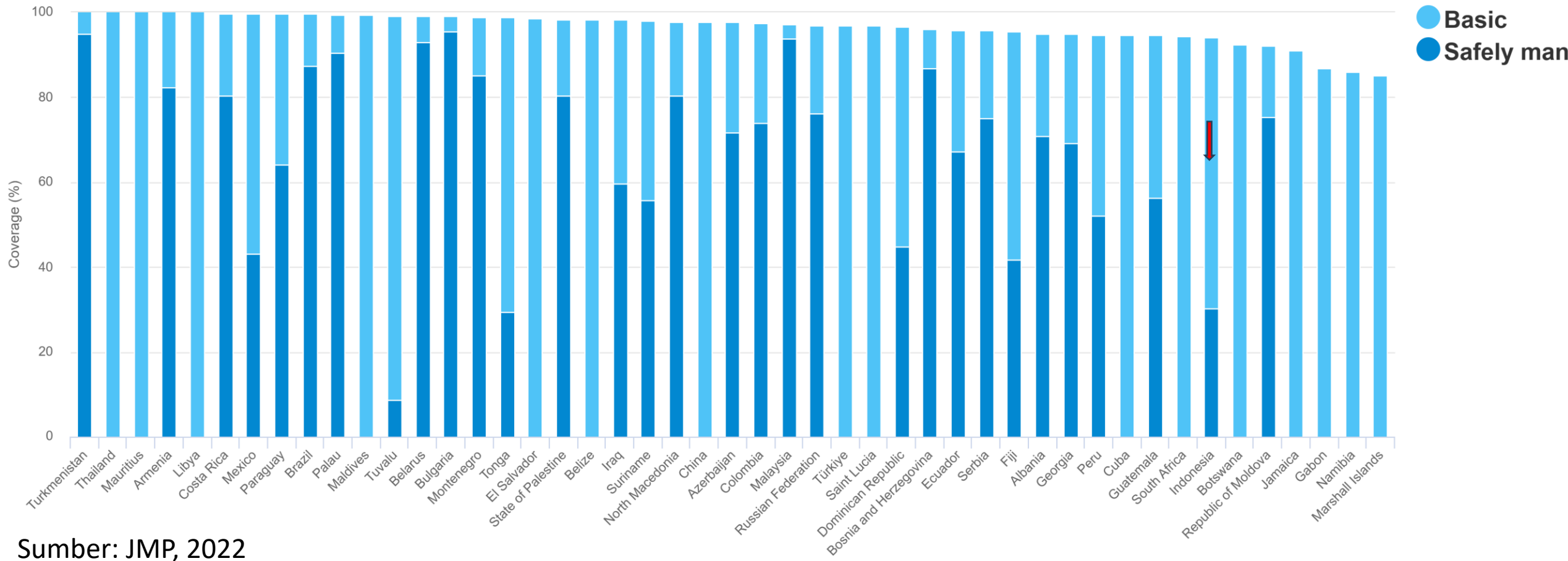
Bagian 1: Status Akses Air dan Sanitasi

Household data - Sanitation - 2022 - Service Levels



Sumber: JMP, 2022

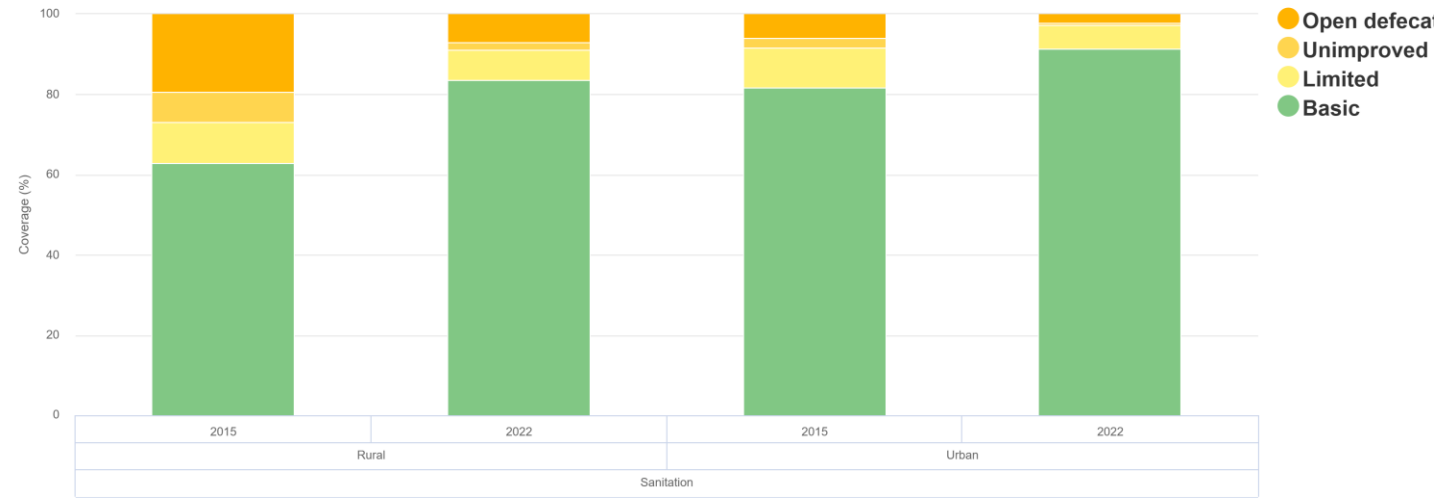
Household data - Drinking Water - 2022 - Service Levels



Sumber: JMP, 2022

Sumber: JMP, 2022

Household data - Indonesia - Service Levels



Sanitasi Indonesia dalam Kondisi *Menyedihkan*

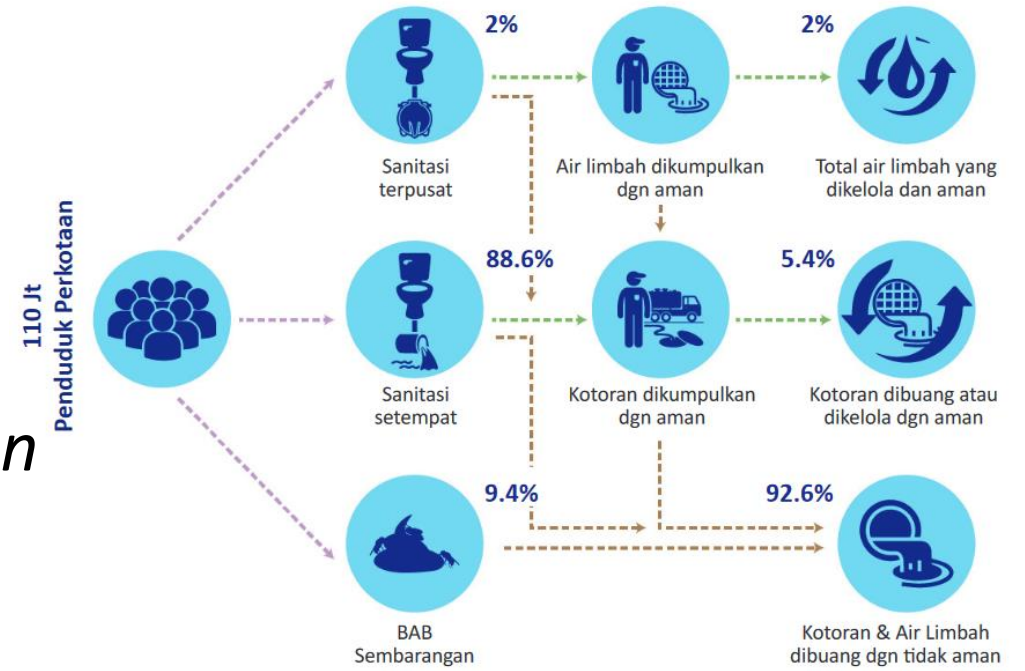
Definitions of access to sanitation facilities

All countries have agreed to work towards universal access to safe sanitation by 2030 as part of the UN Sustainable Development Goals.

Safely managed	Basic	Limited	Unimproved	Open defecation
<p>Use of improved facilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> - not shared with other households; - excreta safely disposed in-situ or transported for treatment off-site 	<p>Use of improved facilities that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misses a 'Safely managed' criteria - not shared with other households 	<p>Use of improved facilities that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misses a 'Safely managed' criteria - are shared with other households 	<p>Use of pit latrines without a slab or platform, hanging latrines or bucket latrines</p>	<p>Disposal of human faeces in fields, forests, bushes, open bodies of water, beaches and other open spaces</p>

Improved sanitation facilities

Improved sanitation facilities are those designed to hygienically separate excreta from human contact. Includes: flush to piped sewer system; septic tanks or pit latrines; composting toilets or pit latrines with slabs.

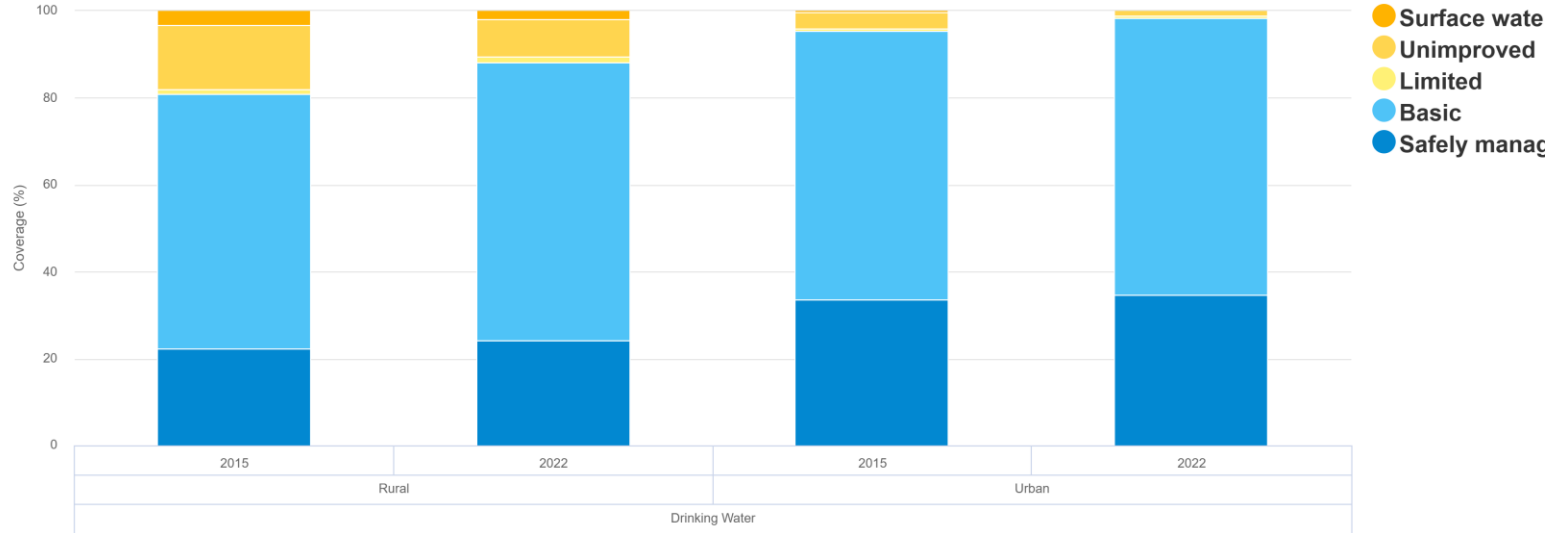


Bappenas, 2019

Source: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation. Our World in Data - Research and data to make progress against the world's largest problems.

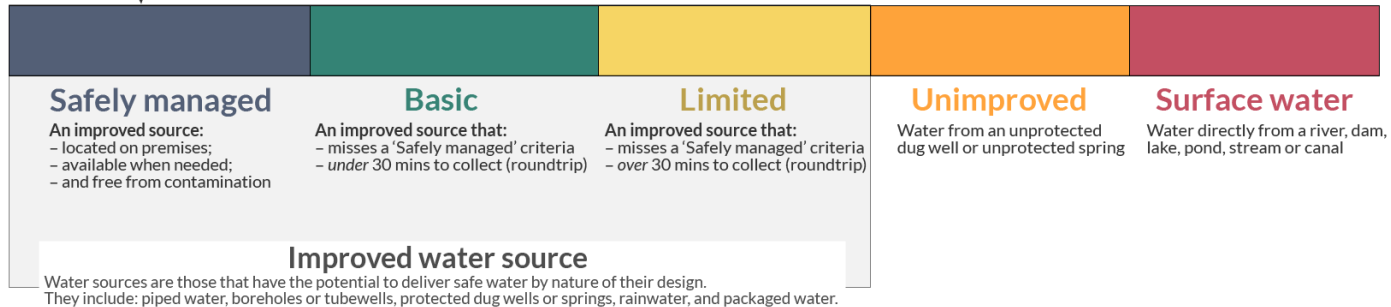
AlAfghani, Mohamad Moya, 2024. License under CC BY by the author Hannah Ritchie.

Household data - Indonesia - Service Levels



Definitions across the drinking water ladder

All countries have agreed to work towards universal access to safe drinking water by 2030 as part of the UN Sustainable Development Goals.



Source: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation. OurWorldinData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie.

Permasalahan Air dan Sanitasi di Indonesia

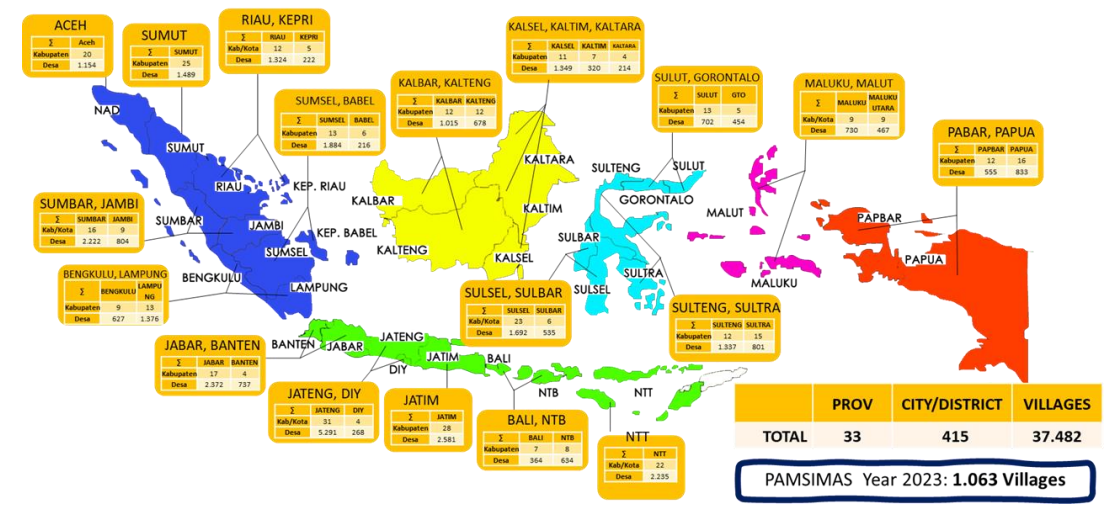
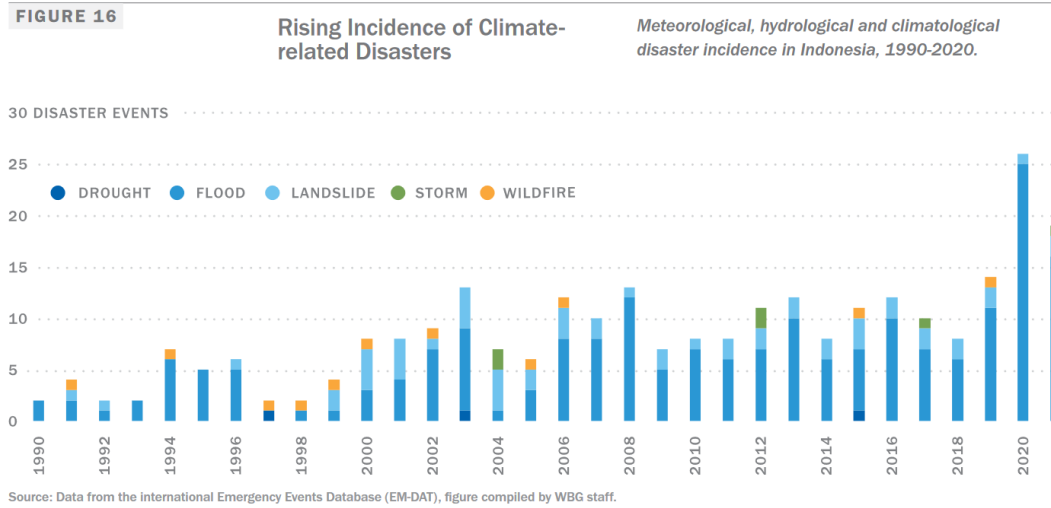
Aspek	Rincian
Akses Penyediaan Air	Hanya 23% (2018) warga Indonesia yang memiliki akses ke air perpipaan, jauh di bawah target pemerintah sebesar 60%.
Penggunaan Air Tanah	Penggunaan air tanah mandiri sangat tinggi, mengakibatkan penurunan muka air tanah dan amblesnya tanah.
Efisiensi Sistem	Sistem penyediaan air banyak yang kurang efisien dengan penggunaan kapasitas pengolahan yang rendah dan tingginya air tidak terhitung.
Kualitas Air	Kualitas air pipa seringkali tidak memenuhi standar, dengan pengawasan yang minim.
Akses Sanitasi	Hanya kurang dari 2% populasi yang memiliki akses ke jaringan sanitasi; 17% penduduk desa masih praktik buang air besar sembarangan.
Pengolahan Air Limbah	Hanya 7,4% air limbah kota yang diproses secara aman; 92,6% lagi dibuang tanpa pengolahan.
Sumber Polusi	Sekitar 70% polusi air tanah berasal dari tangki septik yang bocor dan pembuangan septik yang tidak tepat.
Dampak Kesehatan Publik	Berkontribusi pada prevalensi stunting yang tinggi di kalangan anak-anak (35% dari anak-anak di bawah usia lima tahun), dikaitkan dengan polusi air dan sanitasi yang tidak memadai.



Selain gizi yang baik, sanitasi yang baik juga diperlukan

Bagian 2: Tantangan Krisis Iklim

Studi Kasus Penyediaan Air Minum Pedesaan



(Willetts J, 2024)

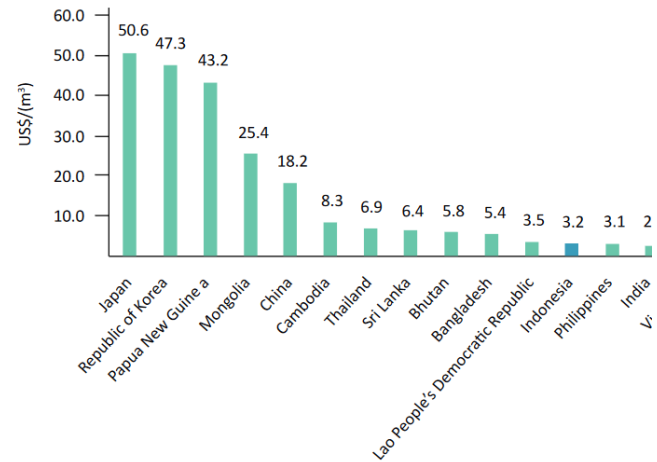
(Indonesia CCCR, WB, 2023)

Tantangan Sumber Daya Air

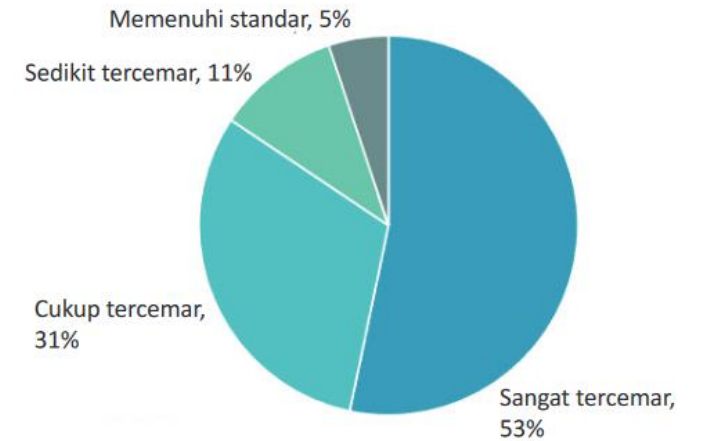
Peta 2: Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai yang menyumbang 60% dari PDB (2045)



Gambar 12: Total produktivitas air (US\$/m³) di seluruh negara Asia



Gambar ES.8: Status kualitas air sungai di seluruh Indonesia (2019)



Sumber: WB, 2022

Dampak Perubahan Iklim Sudah Terasa



DOKUMENTASI BPBD KABUPATEN BOGOR

The Regional Disaster Mitigation Agency (BPBD) of Bogor Regency distributed water to residents in several villages in Jasinga and Nanggung Districts, Bogor Regency, West Java. Drought and clean water crisis have been felt by residents since June 2nd, 2023.

BOGOR, KOMPAS - The government of Bogor Regency in West Java distributed 65,000 liters of clean water assistance to 5,263 residents affected by drought in Jasinga and Nanggung districts, western part of



Awal Agustus 2023, 10 Desa pada 5 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Terdampak Krisis Air Bersih

Sasar 66 KK Terdampak Kekeringan, 16 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Sukoharjo

Dua bulan terakhir Dukuh Babalan mengalami krisis air bersih.

Rep: Muhammad Noor Affian/ Red: Yusuf Assidiq



Foto: Dokumen



Sugemah warga Dusun Kobontaman, Desa Kalikayen, Kabupaten Semarang, menyiapkan berbagai wadah untuk menampung bantuan air bersih di lingkungannya, Jumat (11/8/2023). | Republika/Doviq Fribidi



MUAKHMAD SAFUAN
Volume air di pintu bendungan di Sungai B1 di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah alami penyusutan pada 2018 saat musim kemarau.

DESA terlanda kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus bertambah. Dari sebelumnya tercatat 11 desa kini telah mencapai 62 desa, bantuan air bersih juga masih terus digelontorkan meski stok semakin menipis.

Sumber koleksi gambar: Willetts, J, 2024

In Dumai, kekeringan dalam waktu Panjang, korosi dari salinitas di daerah Pantai menjadi ancaman utama



Di Sintang, sumber air dari sungai sangat dipengaruhi curah hujan dan banjir



Di Sumba Timur, banjir merusak intake di mata air dan pipa transmisi; badai merusak panel surya



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Veritas, Probatus, Iustitia | Est. 1849

Di Banyak Pedesaan di Jawa Barat: Musim Hujan, Air Sulit



Reservoir Pamsimas di Desa Bojong Koneng, Sentul, kering karena setiap kali hujan, lumpur membuat mampet pipa (2024/04/24). Karena kelelahan selalu melakukan perbaikan ketika hujan, 2 pengurus jatuh sakit



Suplai air Pamsimas di Desa Sukajadi, Kab Bogor (Kaki Gunung Salak) tidak jalan menjelang Idul Fitri karena hujan deras di atas. Perbaikan harus dilakukan dengan jalan kaki selama 4 jam (2024/04/23)



Penggunaan mulsa mempercepat erosi



Sedimentasi tinggi akibat faktor alami dan pertanian menyebabkan banjir



Limpasan air membuat pipa terekspose, akhirnya bocor atau rusak



Tanaman keras berkurang, diganti sayuran/cash crops



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probatio, Iustitia | Est 1849



UNIVERSITA
GADJAH MAI



Institute for
Sustainable
Futures

Banjir Mengancam Infrastruktur Air



Kita harus menggunakan air dari sawah (saluran irigasi) akhirnya gatal-gatal... Ini [berlangsung sekitar] dua bulan. Terutama anak-anak bayi banyak terkena gatal-gatal.... (FGD Ibu-ibu). Yang kasihan balita pas tidur malam, mereka gatal-gatal, banyak yang terkena penyakit kulit (FGD Bapak-Bapak)

Susah dapat air bersih.... Suka berantem ketika bantuan air datang. Capek juga bawa air. Berantem dengan tetangga rebutan air. Banyak yang nggak kebagian



AlAfghani, Mohamad Alvin, 2024

Bagian 3: Aksi Legislatif untuk Akses Air Berketahanan Iklim

Kita Perlu UU Pelayanan Air dan Sanitasi

NEWS • INDONESIA

Indonesia needs a strong water services law

The current condition in the water and sanitation sector is bleak

Mohamad Mova Al`Afghani (The Jakarta Post)
UK • Mon, August 31, 2009

[Op-Ed ini saya tulis pada tahun 2009](#). 15 tahun kemudian (hari ini) kita masih **belum punya** UU Pelayanan Air dan Sanitasi

PP 122/2015 bukan UU Pelayanan Air dan Sanitasi, PP tersebut hanya menerapkan segelintir pasal dari UU SDA 17/2019



LAWS OF MALAYSIA

Act 655

WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006



THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

PUBLIC UTILITIES ACT 2001

Vietnam: To unify 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Drainage



09:22, 04/12/2023

According to [Resolution 203/NQ-CP](#) dated December 1, 2023 at thematic session on lawmaking in November, the Government of Vietnam unified 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Sewerage.

Dương Châu Thanh

Vietnam: To unify 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Drainage

Specifically, the Government basically agrees with 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Drainage as proposed by the Ministry of Construction, including:

- (1) Develop water supply and drainage synchronously, consistently, and effectively according to strategies, planning and plans;
- (2) Manage, operate, and exploit water supply and drainage systems;
- (3) Ensure resources for water supply and drainage development.

Beberapa Fitur UU Pelayanan Air dan Sanitasi

- Pengakuan legal untuk berbagai model penyediaan layanan air dan sanitasi (PDAM, berbasis Masyarakat dsb)
- Regulasi Monopoli Alamiah
 - Mewajibkan konsolidasi PDAM sesuai dengan *economy of scale and scope* (mengubah lampiran UU Pemerintahan Daerah)
 - Menarik kewenangan air minum dan sanitasi apabila daerah tidak mampu menyelenggarakan (hal ini pernah dilakukan di Malaysia)
 - Membuat badan regulator independen dan regulasi tarif berdasarkan insentif (contoh: RPI-K/price cap, apabila PDAM efisien, maka tarif yang dikenakan akan dikurangi dengan efisiensi PDAM)
- Perlindungan Konsumen
 - Penerapan standar layanan disertai insentif dan disinsentif (contoh: apabila air tidak mengalir dalam 24 Jam, maka konsumen diberi ganti rugi)
- Partisipasi Publik dan Transparansi
 - Memastikan pelayanan air tidak dilakukan dengan **cherry picking** (menyambungkan hanya ke wilayah elit atau bisnis)



Ruang Pengaturan Sanitasi Sangat Terbatas



Diskusi RUU SDA Tahun 2018 dengan fraksi Gerindra/Komisi V



Penyerahan rekomendasi RUU SDA dari Jejaring AMPL ke Komisi V (2018)

Sanitasi hanya disebut **satu kali** dalam penjelasan Pasal 24 UU SDA 17/2019; itu pun setelah melalui advokasi yang panjang

Konsekuensinya: **tidak bisa** ada PP Sanitasi, pengaturannya "terpaksa" dicantolkan di air minum

Akibatnya...

"Hanya 7,4% air limbah kota yang diproses secara aman"



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan

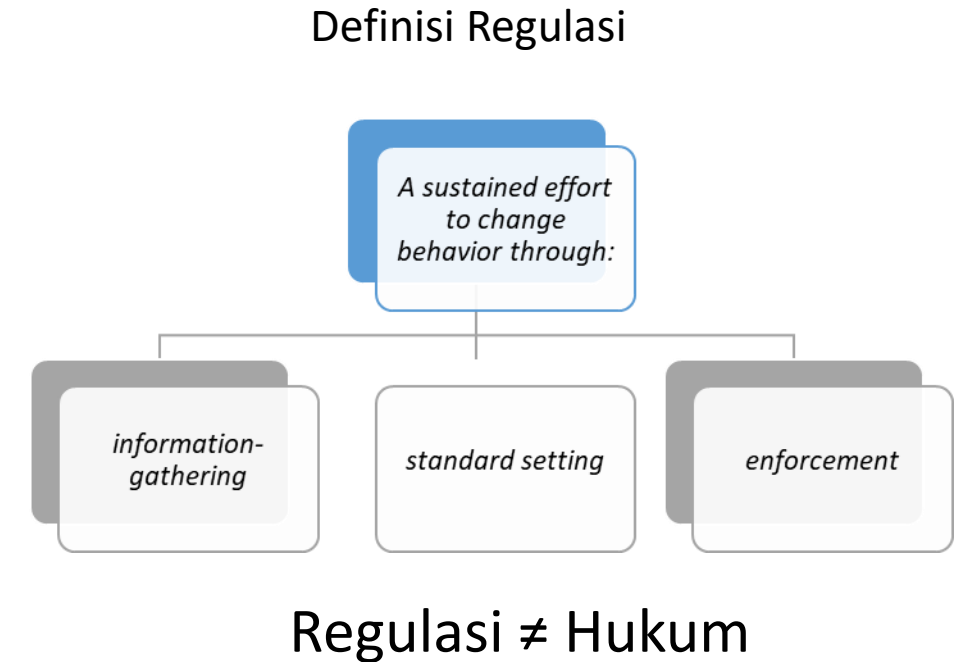


70% AIR RUMAH TANGGA
INDONESIA TERCEMAR
TINJA, UNICEF BIKIN
KAMPANYE #DIHANTUITAI

VCS

Perlu Omnibus Law untuk Krisis Iklim

1. Tantangan iklim bersifat multisektor: tata ruang, pertanian, kehutanan, sumber daya air, pelayanan air, ketahanan pangan, energi, dan sebagainya → Perlu Omnibus Law
2. Omnibus Law Krisis Iklim (OLKI) sebaiknya memberikan prioritas utama pada adaptasi; mitigasi diprioritaskan sejauh sejalan dengan adaptasi, misalnya konservasi lahan gambut
3. Omnibus Law Krisis Iklim perlu mengadopsi **prinsip-prinsip regulasi adaptif**



Prinsip 1: Pembangunan masa kini tidak boleh mengganggu adaptasi iklim di masa depan

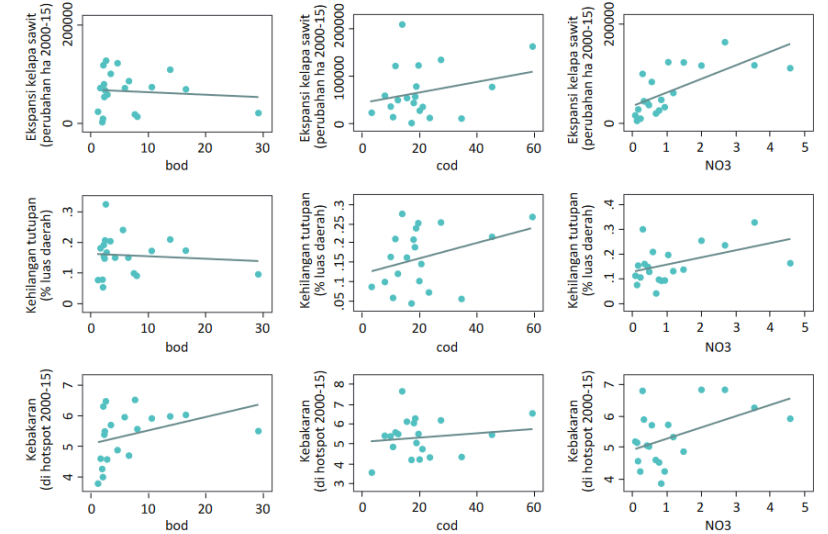
- Banjir akan makin parah
- Kekeringan akan semakin parah
- Badai dan cuaca buruk akan semakin meningkat
- Air tanah harus dijadikan tabungan masa depan

Dampak Aktivitas Tambang Nikel, 5 Desa di Sulawesi Kesulitan Air Bersih



Perahu milik nelayan terdampar di desa terdampak di Kotabala, Kabupaten Sulawesi Tenggara, 14 April 2023, sebagai ilustrasi. (Foto: BERTALIA/ Yusuf Ahmad)

Gambar 18: Korelasi ekspansi kelapa sawit, deforestasi, dan kebakaran hutan, dengan kualitas air



Perkebunan kelapa sawit memperburuk kualitas air (belum termasuk pabrik) – (WB, 2022)



Krisis Air Bersih Hantui Pulau Wawonii Kala Tambang Nikel Mulai Beroperasi

oleh Riza Salman [Wawonii] di 6 June 2023



Prinsip 2: Peraturan Harus Mudah Diubah (Karena alam juga akan cepat berubah)

1. Undang-Undang mengatur hal-hal **pokok, azas dan prinsip umum** saja
2. Standar, prosedur diatur tingkat Peraturan Menteri/Peraturan Presiden

PP perlu waktu tahunan untuk diubah, sementara dalam 5 tahun entah apa yang akan terjadi dengan iklim



KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1
d. Tidak Spesifik Lain:		
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1

No	Kode	Judul	Isi	Uraian	Kategori	Tingkat	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu
26.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Wir Bersih	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri



**Prinsip 3:
Internalisasi
trade-off**

Tipe	Deskripsi
1. Tradeoff Adaptasi vs. Mitigasi	Tindakan adaptasi, seperti membangun tembok laut atau mengubah penggunaan lahan untuk mencegah kerusakan akibat banjir, dapat bertentangan dengan upaya mitigasi seperti melestarikan penyerapan karbon. Dalam pertanian, mengubah hutan menjadi lahan pertanian meningkatkan produksi pangan tetapi mengurangi penyerapan karbon, yang merupakan contoh tradeoff antara meningkatkan hasil pertanian dan mempertahankan tutupan hutan sebagai strategi mitigasi.
2. Tradeoff Mitigasi vs. Mitigasi	Ini terjadi ketika dua strategi mitigasi bertentangan. Misalnya, mempromosikan bioenergi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil mungkin bersaing dengan upaya penghijauan, karena kedua strategi memerlukan lahan. Keputusan harus menyeimbangkan manfaat langsung dari bioenergi dengan manfaat penyimpanan karbon jangka panjang dari hutan.
3. Tradeoff Adaptasi vs. Adaptasi	Berbagai strategi adaptasi juga dapat bertentangan. Misalnya, meningkatkan pengalihan air untuk mengamankan pasokan air perkotaan dapat mengurangi aliran sungai yang diperlukan untuk mempertahankan ekosistem lahan basah, yang juga penting untuk adaptasi dengan menahan badai dan banjir.
4. Tradeoff Antara Kebijakan Iklim dan Tujuan Sosial Lainnya	Kebijakan yang bertujuan untuk tujuan iklim mungkin bertentangan dengan tujuan sosial lainnya. Misalnya, kebijakan mitigasi yang ketat dapat menyebabkan biaya energi yang lebih tinggi, yang berdampak pada pengembangan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan.

Prinsip 4: Berikan diskresi yang luas pada Kementerian/Badan



REGULASI TRADISIONAL (COMMAND AND CONTROL)
SANGAT KAKU DAN TIDAK RESPONSIF TERHADAP
PERUBAHAN YANG CEPAT



DENGAN MENGGUNAKAN DISKRESI EKSEKUTIF, MAKA
REGULASI AKAN BISA LEBIH LINCAH, EFISIEN DAN
BERBASIS KEAHLIAN



NAMUN DEMIKIAN, DISKRESI YANG LUAS DAPAT
MEMICU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, MAKA
DARI ITU FUNGSI PENGAWASAN PERLU DIPERKUAT

Prinsip 5: Penguatan Pengawasan Legislatif

Beberapa metode pengawasan:

- Pelaporan berkala
- Evaluasi berkala terhadap hasil dan proses
- “Sunset Clause”:
Diskresi yang besar diberikan batasan waktu dan hanya dapat diperpanjang lewat UU



Renungan:

*Apakah Hukum dan Institusi akan mampu
“beradaptasi” dengan perubahan iklim?*

Terima Kasih